

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kerdasarkan hasil kerja praktik yang telah dilaksanakan di Desa Bumi Jaya, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan, dengan topik Pengelolaan Bantuan Sosial Berbasis Administrasi Desa, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting.

1. Permasalahan utama dalam pengelolaan bantuan sosial di Desa Bumi Jaya adalah masih digunakannya sistem pencatatan manual. Sistem manual ini menimbulkan berbagai kendala, di antaranya duplikasi data penerima, keterlambatan proses distribusi, dan kurangnya transparansi dalam penyaluran bantuan. Kondisi ini sejalan dengan penelitian (Prasetyo et al., 2022) yang menyatakan bahwa kelemahan administrasi manual sering menjadi penyebab konflik sosial akibat ketidaktepatan sasaran penerima bansos.
2. Rancangan sistem berbasis teknologi informasi yang dihasilkan dari kerja praktik ini terbukti mampu mengatasi sebagian besar permasalahan tersebut. Sistem berbasis database dengan fitur validasi NIK memberikan solusi efektif untuk mencegah data ganda. Selain itu, fitur laporan otomatis dan dashboard monitoring mempermudah perangkat desa dalam memantau penerima bansos secara real-time. Hal ini mendukung hasil penelitian (Noviarani & Chotijah, 2021) yang menyatakan bahwa sistem validasi berbasis identitas tunggal mampu meningkatkan akurasi pendataan bantuan

sosial secara signifikan.

3. Penerapan sistem ini juga meningkatkan efisiensi waktu dan beban kerja perangkat desa. Jika sebelumnya pencetakan laporan membutuhkan waktu 3–4 hari, dengan sistem baru laporan dapat dihasilkan dalam hitungan menit. Efisiensi ini memberikan ruang bagi perangkat desa untuk fokus pada pelayanan masyarakat lain. Seperti dinyatakan oleh (Idrus & Zakiyah, 2022), otomatisasi laporan mampu memangkas waktu administrasi hingga 80%.
4. Transparansi dan akuntabilitas juga meningkat dengan adanya fitur publikasi data penerima bantuan. Masyarakat dapat mengakses informasi mengenai siapa saja penerima bansos, sehingga potensi kecurigaan atau konflik sosial dapat diminimalkan. Hal ini mendukung prinsip good governance yang menekankan pentingnya partisipasi dan transparansi.
5. kerja praktik ini membuktikan bahwa penerapan Sistem Pengelolaan Bantuan Sosial Berbasis Administrasi Desa di Desa Bumi Jaya mampu memberikan perubahan signifikan dari sistem manual menuju sistem digital yang lebih efisien, akurat, dan transparan. Sistem ini berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut serta direplikasi di desa-desa lain sebagai model tata kelola bansos berbasis teknologi informasi.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan lebih lanjut dalam pengelolaan bantuan sosial berbasis administrasi desa, baik untuk Desa Bumi Jaya maupun

desa-desanya lain.

1. Pemerintah desa perlu melakukan implementasi penuh terhadap sistem pengelolaan bansos berbasis administrasi digital. Hal ini berarti perangkat desa harus mulai meninggalkan metode manual secara bertahap dan beralih ke sistem berbasis database. Dengan demikian, akurasi data penerima bansos dapat lebih terjamin, dan distribusi bantuan dapat dilakukan tepat sasaran.
2. Diperlukan adanya pelatihan rutin bagi perangkat desa. Meskipun sistem telah dirancang sederhana agar mudah digunakan, tetap dibutuhkan pembekalan teknis mengenai pengoperasian komputer, input data, hingga pencetakan laporan. Pelatihan ini dapat dilakukan bekerja sama dengan pihak akademisi, mahasiswa, maupun dinas terkait, agar perangkat desa memiliki keterampilan yang memadai.
3. Dari sisi infrastruktur, pemerintah desa disarankan untuk menyediakan sarana pendukung teknologi seperti komputer dengan spesifikasi memadai, perangkat penyimpanan data, serta akses internet yang stabil. Infrastruktur ini merupakan faktor penentu agar sistem dapat berjalan optimal. Tanpa dukungan teknologi yang memadai, sistem akan sulit dioperasikan secara konsisten.
4. Pemerintah desa meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat, pemerintah desa dapat memanfaatkan papan informasi digital atau portal desa yang terhubung dengan sistem bansos. Dengan demikian, masyarakat dapat mengakses data penerima bantuan kapan saja, sehingga mendorong terciptanya akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.

5. Sistem ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan integrasi ke database kependudukan kabupaten atau provinsi. Dengan integrasi data lintas instansi, potensi duplikasi penerima bantuan antar desa atau antar program dapat diminimalkan. Hal ini juga akan memudahkan koordinasi antara desa dengan dinas sosial maupun pemerintah daerah.
6. Kerja praktik ini sebaiknya dijadikan dasar untuk penelitian lanjutan. Pengembangan sistem tidak hanya terbatas pada pengelolaan bansos, tetapi juga dapat diperluas untuk administrasi kependudukan, keuangan desa, dan perencanaan pembangunan. Dengan demikian, Desa Bumi Jaya dapat menjadi pelopor dalam penerapan konsep smart village berbasis teknologi informasi.

Meskipun sistem ini memberikan banyak manfaat, terdapat tantangan dalam penerapannya. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia perangkat desa dalam mengoperasikan teknologi informasi. Diperlukan pelatihan berkelanjutan agar sistem dapat digunakan secara maksimal. Selain itu, dukungan infrastruktur teknologi, seperti komputer dan jaringan internet, juga perlu diperkuat agar sistem berjalan optimal.

Dengan adanya saran-saran tersebut, diharapkan sistem pengelolaan bansos berbasis administrasi desa yang dirancang dalam kerja praktik ini dapat terus ditingkatkan dan diimplementasikan secara berkelanjutan. Tidak hanya memberikan manfaat bagi perangkat desa, tetapi juga mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat desa.